

Karutan Surakarta Jadi Juri Lomba Debat FH UNS, Perkuat Sinergi Akademisi–Pemasyarakatan

Kevin Guntur - [SURAKARTA.TELISIKFAKTA.COM](https://surakarta.telisikfakta.com)

Nov 24, 2025 - 19:50



Dok : Humas Rutan Surakarta

Surakarta — Kepala Rutan Kelas I Surakarta turut ambil peran sebagai juri dalam Lomba Debat Internal Komunitas Debat Fakultas HUKUM (KDFH) Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan yang mengusung tema “Rekonstruksi Hukum Indonesia Berbasis Pancasila dalam Menghadapi Krisis Demokrasi dan Konfigurasi Politik” tersebut digelar di Aula Fakultas Hukum UNS pada 22–23 November.

Kompetisi debat ini diikuti oleh berbagai tim mahasiswa KDFH dan dihadiri para akademisi, pakar hukum, serta Dekan Fakultas Hukum UNS. Diskusi hukum berlangsung dinamis, menyoroti tantangan demokrasi kontemporer, penguatan budaya politik nasional, serta urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum Indonesia.

Kehadiran Karutan Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan tidak hanya sebagai penilai kompetisi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan sekaligus kolaborasi strategis antara lingkungan akademik dan institusi pemasyarakatan. Sinergi ini diharapkan mampu memperluas wawasan publik mengenai fungsi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan transformasi hukum nasional.



“Debat seperti ini menjadi ruang penting bagi mahasiswa hukum untuk berpikir kritis, berani berargumentasi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kami di Pemasyarakatan sangat terbuka berkolaborasi dengan dunia akademik, karena masa depan hukum Indonesia berada di tangan generasi muda yang memiliki integritas, kepedulian sosial, dan keberpihakan pada keadilan,” ujar Karutan Surakarta.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan Pemasyarakatan dalam ruang dialog ilmiah merupakan bagian dari komitmen meningkatkan literasi hukum publik serta mendorong pembaruan sistem hukum yang humanis, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan demokrasi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Fakultas Hukum UNS dan Rutan Surakarta berharap kerja sama serupa dapat terus berlanjut, menghadirkan ruang edukasi, advokasi, dan refleksi bagi pembangunan hukum nasional yang lebih progresif dan berlandaskan Pancasila.